



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang lekat dengan pandangan atau paham yang memegang teguh ajaran atau pemahaman yang dibawa sejak kecil. Agama merupakan nilai yang melekat dan menjadi ukuran manusia menjalani kehidupan. Pemahaman ini menyebabkan kehidupan sosial, hukum, dan politik masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh agama (Hardiwinoto, 2015).

Fakta tentang hal ini tergambar ketika Gallup melakukan survei di 114 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa agama memainkan peran penting dalam kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Berikut adalah data yang didapat Gallup pada tahun 2009, dimana Indonesia masuk pada peringkat empat yang memandang agama merupakan nilai yang penting dalam kehidupan (Carbtree, 2010)

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Gambar 1.1: Hasil Survei Agama Merupakan Unsur Penting Dalam Kehidupan

	Yes
Bangladesh	99%+
Niger	99%+
Yemen	99%
Indonesia	99%
Malawi	99%
Sri Lanka	99%
Somaliland region	98%
Djibouti	98%
Mauritania	98%
Burundi	98%

2009
GALLUP

Sumber: www.gallup.com

Agama selalu menjadi salah satu faktor, ketika ingin mendapat kekuasaan politik dan pemerintahan. Kepercayaan dan agama menjadi ukuran layak atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin. Kerap kali dalam dunia politik, faktor agama menjadi syarat utama untuk bisa berpolitik atau menduduki jabatan penting. Meskipun hak berpartisipasi dalam politik menurut konstitusi pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara tanpa embel-embel harus menganut agama tertentu. Bukti pentingnya agama tergambar dari hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny Januar Ali (LSI Denny JA) pada tanggal 5-11 Januari 2017, dimana sebanyak 71,4% responden menyatakan kesamaan agama penting dalam menentukan pilihan calon gubernur (Aji, 2017).

Dalam undang-undang 1945 yang mengatur tentang pemilihan presiden maupun legislatif, tidak tertera aturan calon harus memeluk agama

tertentu. Namun dalam praktik, seringkali hak-hak politik calon pemimpin dari kelompok minoritas dikesampingkan. Bukan hanya untuk mendapatkan jabatan, agama juga digunakan untuk menjatuhkan elektabilitas seseorang dalam kompetisi mendapatkan kursi kekuasaan. Fenomena yang paling sering terjadi banyak isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan) yang dikaitkan dalam kampanye hitam untuk menjatuhkan salah satu kandidat.

Salah satu peristiwa politik yang menunjukkan bahwa isu agama secara masif dipergunakan, pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu. Pilpres 2014 merupakan yang pertama diikuti oleh 2 tokoh politik yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tak hanya dari jumlah calon, pemilu yang diselenggarakan untuk memilih Presiden Indonesia ke-7 tersebut diwarnai oleh banyaknya kasus kampanye hitam terkait SARA.

Uniknya Pilpres 2014, bukan hanya salah satu tokoh saja yang diserang isu-isu SARA, tetapi kedua tokoh yang berkompetisi sama-sama terkena kampanye hitam bernuansa SARA. Sebut saja salah satunya, Joko Widodo menerima banyak kampanye hitam, terkait dengan isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA). Bentuk kampanye hitam kepada Jokowi jelas terlihat pada saat diterbitkannya Tabloid Obor Rakyat, pada 5-11 Mei 2014. Tabloid ini membahas isu agama dan ras capres Joko Widodo, dimana pembaca tabloid diberikan informasi agar

percaya bahwa Joko Widodo bukanlah muslim dan pribumi asli. Tabloid membangun konstruksi bahwa Joko Widodo bukan asli Indonesia, melainkan orang asing yang berbeda agama dan ingin menguasai Indonesia. Bangun konstruksi tersebut jelas terlihat pada pemilihan judul-judul dari artikel tabloid *Obor Rakyat* yang sangat tendensius. Pada salah satu edisinya, tabloid mengambil judul *Status Perkawinan ibunda Jokowi dengan Pey Hong Liong?* Judul artikel mengarahkan pembaca pada konstruksi pemahaman bahwa dalam tradisi Cina kaya di Indonesia, wanita pribumi hanya dijadikan gundik saja (Regina, 2016).

Penggunaan isu SARA dalam politik terutama pada masa pemilu tidak berkurang. Fakta kehadiran isu SARA jelas terlihat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Para politisi yang berkompetisi masih menggunakan isu SARA dan ini membuktikan bahwa isu SARA masih sangat laku dijual untuk mengalahkan lawan politiknya. Terlebih juga salah satu kandidat yang ikut pertarungan Pilkada DKI 2017, kebetulan seseorang keturunan Cina dan menganut agama Kristen yaitu Basuki Tjahaja Purnama.

Pidato Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 27, saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dianggap menghina agama. Anggapan menghina agama tersebut merebak setelah 6 November 2016, karena Buni Yani mengunggah video dengan ditambahi

komentar editan yang menyudutkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai kandidat yang bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Bukan rahasia umum juga, bahwa sejumlah kalangan sejak awal sangat menentang Ahok. Dengan unggahan video pidato diatas, memberikan mereka ruang mengangkat isu SARA. Penantang Ahok seperti menemukan momentum ketika dia menyinggung penggunaan surat Al Maidah dalam pidatonya kepada warga Pulau Seribu (BBC, 2016).

Isu agama selalu diangkat dan sensitif karena dapat memicu pergolakan sosial, meskipun demikian para politisi terlihat acuh dan isu berbau SARA tetap terasa sangat kental hadir pada arena politik Indonesia. Aksi perdana menguatnya isu SARA dipergunakan pada tanggal 4 November 2016, berikutnya pada 12 Desember 2016, dilakukan oleh sejumlah kelompok muslim yang mendesak Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka. Aksi ini terbilang cukup besar, karena menarik banyak media asing ikut memberitakannya seperti Bloomberg, Sidney Morning Herald, dan Bloomberg (Icha Rastika, 2016). Walaupun aksi tersebut berasal dari kelompok muslim, namun nuansa politis dari aksi tersebut terlihat sangat kental. Terbukti kemunculan sejumlah tokoh politik dan ikut menjadi bagian dari aksi tersebut, hal ini terbaca dalam laporan Detik.com pada tanggal 4 November 2016 melansir kehadiran beberapa anggota DPR, ikut dalam demo yang diatas namakan gerakan Islam damai.

Karena desakan yang menguat dari beberapa kalangan dan demi stabilitas politik, akhirnya pidato yang dianggap menistakan agama diselesaikan pemerintah melalui jalur hukum. Pada tanggal 16 November 2016 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi dijadikan tersangka. Calon Gubernur petahan ini harus menjalani persidangan untuk membuktikan apakah ia bersalah atau tidak.

Kasus Basuki Tjahaja Purnama sangat menarik perhatian publik, hal ini yang menyebabkan media berbondong-bondong menyiarkan informasi tentang kasus penistaan agama. Disamping itu juga, isu-isu agama selalu menarik dan penting untuk menarik minat pembaca berita, sehingga media selalu meliputnya. Nilai berita, isu SARA cukup baik yang memberikan manfaat ekonomi pada media, sehingga peliputan isu ini menjanjikan keuntungan bisnis yang baik juga. Hasil survei pembaca dan pendengar mengenai agama, digabungkan dengan temuan jajak pendapat pengguna internet menghasilkan temuan: bahwa enam dari sepuluh orang Amerika mengatakan agama itu “sangat penting” dalam kehidupan. Seperempat pengguna internet melakukan pencarian informasi mengenai agama melalui jaringan (daring), dan agama merupakan sebuah bagian dalam persoalan yang secara terus menerus disebut dengan tingkat kepedulian tertinggi (Junaidi, 2006, h. 2-4).

Sacara faktual dapat disebut bahwa agama termasuk dalam kategori isu yang sensitif dan sarat konflik. Menyikapi kondisi ini kadang-kadang media menampilkan dirinya dalam posisi yang dilematis. Dalam isu agama, media seringkali tampil pada posisi yang mungkin disadari atau tidak, telah masuk dalam ‘perangkap’ konflik tersebut (Suranto, 2010, h. xxxvi).

Persidangan Ahok sangat ramai diberitakan oleh media massa, bisa juga dikatakan pemberitaan kasus ini terbilang cukup intensif, karena banyak media massa yang memilih menyiarkan liputan khusus dari sidang penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana media massa, khususnya Harian Republika memberitakan persidangan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Penulis memilih Harian Republika, karena ingin melihat arah pemberitaan media yang dikenal cukup kental nuansa keagamaannya. Untuk mendalami pemberitaan kasus Basuki Tjahaja Purnama yang dimuat dalam Harian Republika, penulis menggunakan Analisis Framing Robert Entman.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis penulis memfokuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Harian Republika membangun konstruksi tentang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam berita sidang penistaan agama terkait Pilkada 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Menemukan konstruksi berita pada sidang penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terkait Pilkada 2017 dalam Harian Republika

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya khasanah penelitian komunikasi, khususnya jurnalistik. Kontribusi dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya Analisis Framing Robert Entman.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat mengenai bagaimana teks berita yang menyangkut isu Suku

Ras Agama dan Antar Golongan (SARA) dan diskriminasi agama diproduksi oleh media. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi media dalam mengkonstruksi pesan yang berkaitan dengan isu-isu sensitif di masyarakat.

